



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,


AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026





BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM



RENCANA KERJA 2026



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan. Dengan adanya Rencana Kerja ini maka Badan Pendapatan Daerah Kota Batam telah mempunyai suatu pedoman pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi demi kelancaran pembangunan kota Batam serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk jangka waktu satu tahun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah.

Mengingat pentingnya peranan Rencana Kerja sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Organisasi Perangkat daerah (OPD), yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimana kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan secara efektif dan efisien terhadap situasi dan kondisi yang ada, maka proses penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini dibuat sebagai tindak lanjut terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Batam, September 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja.....	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dengan Dokumen Perencanaan.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja	3
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	22
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	22
2.3.3 Peluang dan Tantangan	22
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
3.3.1 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	37
3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.	37
3.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif.....	37
3.3.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Hasil Pengerjaan Tabel T-C.33	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Catatan Penting.....	52
5.2 Kaidah Pelaksanaan	52
5.3 Rencana Tindak Lanjut	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 / T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Batam.....	6
Tabel 2.2 / T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.....	21
Tabel 2.3 / T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.....	25
Tabel 2.4 / T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	35
Tabel 3.1 / T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	39
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja Pembangunan adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rancangan Akhir Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan dokumen yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kota Batam yakni “Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berkelanjutan Dan Berbudaya Sebagai Pusat Investasi”, Bapenda Kota Batam yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 205 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025;
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1614).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam di tahun 2026;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

	1.1.4	Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.3.1	Maksud Penyusunan Renja
	1.3.2	Tujuan Penyusunan Renja
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II		HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.3.1	Tingkat Kinerja Perangkat Daerah
	2.3.2	Permasalahan dan Hambatan
	2.3.3	Peluang dan Tantangan
	2.3.4	Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal SKPD
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III		TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Dalam RKPD Tahun 2026
	3.3	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
	3.4	Program dan Kegiatan
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V		PENUTUP
	5.1	Catatan Penting
	5.2	Kaidah Pelaksanaan
	5.3	Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dari target 100% telah mencapai realisasi 100%;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempunyai 2 (dua) indikator yakni Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Retribusi Daerah. Untuk Realisasi Pajak Daerah memiliki target Rp 1.415.400.000.000 namun terealisasi sebesar Rp 1.407.050.918.403 atau tingkat capaian sebesar 99,41%. Sementara untuk Realisasi Retribusi Daerah memiliki target Rp 202.601.013.000 namun terealisasi sebesar Rp 169.736.535.405 atau tingkat capaian sebesar 83,77%.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target realisasi pajak daerah ini sebagai berikut:
 - a. Adanya penurunan jumlah titik reklame dikarenakan pelebaran ruas jalan arteri;
 - b. Belum meratanya distribusi SPPT PBB-P2 kepada masyarakat;
 - c. Transaksi restoran yang melalui aplikasi online belum dapat menjadi objek pemungutan pajak;
 - d. Masih rendahnya tingkat kunjungan ke tempat hiburan di Kota Batam;
 - e. dll.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target realisasi pajak daerah ini sebagai berikut:
 - a. Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga kurang maksimal dikarenakan minimnya armada yang berstatus layak pakai;
 - b. Adanya penurunan jumlah penumpang kapal dikarenakan faktor cuaca;
 - c. Perusahaan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja lokal;
 - d. Harga daging impor jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga daging segar lokal sehingga rumah potong hewan sepi peminat;
 - e. dll.

TABEL 2.1 (T-C. 29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025
KOTA BATAM

Nama Perangkat Daerah: Badan Pendapatan daerah Kota Batam

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Bidang Urusan: Keuangan									
5.0 2.0 1	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;	NA	70,08 Nilai	NA	NA	NA	NA	70,08 Nilai	89,19%
		2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat daerah.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.0 2.0 1.2 .02 .02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.0 2.0 1.2. 02. 000 1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/Bulan	102 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	100%	207 Orang/Bulan	207 Orang/Bulan	158,01%
5.0 2.0 1.2. 02. 000 2	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	NA	NA	12 Dokumen	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5.0 2.0 1.2.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	49 Dokumen	49 Dokumen	-	-	-	-	49 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.000.3	n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	i Keuangan SKPD								
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.02.01.2.05.000.2	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	300%
5.02.01.2.05.001	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	60 Orang	58 Orang	56 Orang	56 Orang	100%	7 Orang	121 Orang	201,66%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Perundang-undangan	Perundang-Undangan								
5.0 2.0 1.2 06. .06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.0 2.0 1.2. 06. 000 1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
5.0 2.0 1.2. 06. 000 2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	8 Paket	9 Paket	9 Paket	100%	8 Paket	9 Paket	90%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.0 2.0 1.2. 06. 000 5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	400%
5.0 2.0 1.2. 06. 000 6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2.0 1.2. 06. 000 9	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80%
5.0 2.0 1.2 .07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.0 2.0 1.2. 07. 000 2	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	33,33%
5.0 2.0 1.2. 07. 000 5	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit	22 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	46 Unit	86 Unit	138,70%
5.0 2.0 1.2. 07. 000 6	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	77 Unit	77 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.0 2.0 1.2 08. 008 000 08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.0 2.0 1.2. 08. 000 000 2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	12 Laporan	8 Laporan	100%
5.0 2.0 1.2. 08. 000 000 3	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	NA	6 Laporan	50%
5.0 2.0	Sub Kegiatan: Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.2.08.0004	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	23 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	23 Unit	24 Unit	88,88%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
5.0 2.0 1.2. 09. 000 6	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	305 Unit	294 Unit	292 Unit	99,3%	275 Unit	305 Unit	101,66%
5.0 2.0 1.2. 09. 001 0	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
5.0 2.0 1	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Realisasi Pajak Daerah	8.037.814.797.151	3.056.769.628.636	1.415.400.000.000	1.407.050.918.403	99,41%	1.482.211.000.000	5.946.031.547.039	73,97%
		2. Realisasi Retribusi Daerah	1.143.067.774.918	330.964.827.505	202.601.013.000	169.736.535.405	83,77%	212.163.781.000	712.865.143.910	62,36%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		1. Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		2. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		3. Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		4. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		5. Persentase	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment.								
5.0 2.0 4.2 .01	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	30%	8,88%	5%	11,84%	236,76%	5%	25,72%	85,73%
		1. Pertumbuhan Wajib Pajak Official Assessment;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		2. Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah yang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dihasilkan;								
		4. Persentase Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		5. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Self Assessment.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.0 2.0 4.1. 01. 000 2	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	8 Dokumen	80%
5.0 2.0 4.2. 01. 000	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	25 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	5 Laporan	83,33%	8 Laporan	18 Laporan	72%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Pajak Daerah	Daerah								
5.0 2.0 4.2. 01. 000 4	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	800 Unit	198 Unit	400 Unit	276 Unit	69%	602 Unit	602	75,25%
5.0 2.0 4.2. 01. 000 5	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80%
5.0 2.0 4.2. 01. 000 6	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	144 Laporan	54 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100%	10 Laporan	94 Laporan	65,27%
5.0 2.0 4.2. 01.	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.400 Layanan	530 Layanan	295 Layanan	298 Layanan	101,01%	9 Layanan	837 Layanan	59,78%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0009										
5.02.04.2.01.0010	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	23.536 Dokumen	23.500 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	17 Dokumen	23.529 Dokumen	99,97%
5.02.04.2.01.0011	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	38.000 Dokumen	14.700 Dokumen	8.000 Dokumen	8.000 Dokumen	100%	17 Dokumen	27.717 Dokumen	72.93%
5.02.04.2.01.0013	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1.386 Dokumen	1.350 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	1.374 Dokumen	99,13%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2.2 (T-C. 30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		√	NA	NA	NA	NA	48,52%	26,76%	54,03%	53,63%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dari tugas dan fungsi ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berupaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra terkait angka Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Potensi Retribusi Daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam menjalankan fungsinya, adalah:

1. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur untuk mendukung tugas dan fungsi Bapenda Kota Batam masih perlu ditingkatkan;
2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya kesadaran membayar pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah transaksi pembayaran yang belum optimal;
3. Perlunya penyempurnaan regulasi terkait pajak dan retribusi daerah;
4. Perlunya peningkatan penerapan mekanisme kerja dan SOP;
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kota Batam;
6. Perlunya peningkatan penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum dilaksanakan secara tegas, sehingga dapat meningkatkan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah;
7. Koordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah masih perlu ditingkatkan.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Sumber-sumber PAD diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ini juga turut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang disebabkan semakin gencarnya pembangunan dan pengembangan di bidang infrastruktur, pariwisata, perumahan dan sektor-sektor lainnya sehingga hal tersebut memberikan sumbangsih terhadap kenaikan target pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Selain dari pada itu, dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Kota Batam terkait kerja sama optimalisasi

pemungutan pajak daerah dan sinergi pemungutan opsen pajak daerah turut memberikan peluang peningkatan PAD, di mana Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Daerah Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Batam secara bersama-sama melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen BBNKB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan Opsen Pajak MBLB.

Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam juga mendapati beberapa tantangan dalam hal pendataan dan pendaftaran Objek Pajak (OP) atau Wajib Pajak (WP) yang mana OP atau WP baru enggan dalam melakukan pendaftaran dan menyampaikan pengkinian data terhadap usahanya. Selain itu koordinasi horizontal dengan OPD Penghasil terkait target dan realisasi penerimaan retribusi daerah perlu lebih ditingkatkan. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam bersama OPD Penghasil juga mempunyai tantangan lain seperti dengan terbatasnya anggaran belanja namun terus dituntut untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan kemudahan pelayanan sehingga akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam terkait kerja sama optimalisasi pemungutan pajak daerah dan sinergi pemungutan opsen pajak daerah, maka menimbulkan adanya sinergi pendanaan (*Cost Sharing*) bagi kedua belah pihak guna membiayai segala aktivitas seperti kerja sama dalam hal penagihan, pendataan objek pajak, sosialisasi optimalisasi pajak daerah, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi, serta kerja sama lainnya guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam hal koordinasi dan eksekusi, akankah kerja sama yang dijalankan dapat mengoptimalkan realisasi PAD guna mendanai pembangunan daerah.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi yang penting untuk mendapatkan perhatian besar dari pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan apabila suatu kondisi tidak diantisipasi akan menimbulkan hambatan dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis Bapenda Kota Batam.

Isu strategis yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah perlunya peningkatan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada beberapa faktor yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan kajian potensi, memperbaiki kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggap perlu, memperluas jaringan kerja sama lintas sektor, mengintensifkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, dan menyederhanakan proses pelayanan serta terus mengembangkan kompetensi SDM aparatur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagai badan yang bertugas sebagai perencana peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD) demi tata kelola pemerintahan yang baik.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.3 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
A	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	46.205.351.631	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah; 2. Indeks Pelayanan Keseekretariatan Perangkat daerah	73,57 91,50	52.774.099.364	
I						Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	29.321.800	
1						Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.541.600	Penambahan Sub Kegiatan Baru
2						Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.782.200	Penambahan Sub Kegiatan Baru
II	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	41.365.692.716	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	46.067.519.040	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	207 Orang/Bulan	41.299.292.716	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/Bulan	46.001.119.040	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	66.400.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	66.400.000	
III	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	381.315.415	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	602.873.800	
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	269.335.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	90.997.200	
2	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	111.980.415	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	511.876.600	
IV	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	2.361.096.500	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	2.551.152.525	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.873.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.287.500	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Paket	617.607.500	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	835.329.125	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	554.262.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	546.408.300	
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	7.200.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.881.600	
5	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.162.154.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.121.246.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
V	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	100%	320.982.000	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	1.864.447.799	
1						Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	974.706.000	Penambahan Sub Kegiatan Baru
2	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	152.766.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 Unit	241.066.700	
3	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	168.216.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit	350.608.100	
4						Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	298.066.999	Penambahan Sub Kegiatan Baru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
VI	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100%	596.400.000	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	596.800.000	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	594.900.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	595.300.000	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000	
VII	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	1.179.865.000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	1.061.984.400	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.640.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.880.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Dinas Jabatan					atau Kendaraan Dinas Jabatan					
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	750.370.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	636.280.000	
3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	375 Unit	384.855.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	275 Unit	384.824.400	
B	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	1.55 T 222 M	10.084.468.500	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	1. Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih; 2. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target; 3. Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah;	10% 98% 4,96%	8.839.064.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
								4. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment;	6.50%		
								5. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment.	6.50%		
I	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	5%	10.084.468.500	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Official Assessment;	2,76%	8.839.064.400	
								2. Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah;	100%		
								3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah yang Dihasilkan;	2 Dokumen		
								4. Persentase Koordinasi dengan PD Penghasil Retribusi;	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
								5. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Self Assessment.	0,90%		
1						Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	131.006.000	Penambahan Sub Kegiatan Baru
2	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	504.190.000	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	296.300.000	
3	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	2.125.331.000	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	1.770.461.900	
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	600 Unit	1.579.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	602 Unit	2.379.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1.326.577.000	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	589.011.300	
6	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	30 Laporan	1.745.100.000	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	10 Laporan	1.630.712.000	
7						Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Batam	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10.000 Obyek Pajak	825.912.000	Penambahan Sub Kegiatan Baru
8	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	61.920.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	61.920.000	
9	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	288.140.500	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	17 Dokumen	236.192.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
10	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9.000 Dokumen	2.133.000.000	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	17 Dokumen	497.950.000	
11						Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	99.991.000	Penambahan Sub Kegiatan Baru
12	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	176.145.000	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	152.317.800	
13						Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	46.882.000	Penambahan Sub Kegiatan Baru
14						Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	121.407.800	Penambahan Sub Kegiatan Baru
TOTAL ANGGARAN					56.289.820.131	TOTAL ANGGARAN				61.613.163.764	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan maupun tingkat Kota, Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan program yang diperlukan untuk dijalankan oleh OPD terkait guna kesejahteraan masyarakat. Usulan masyarakat yang telah disetujui akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja masing-masing OPD sesuai dengan bidang urusannya. Akan tetapi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tidak mendapatkan usulan masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang tersebut.

TABEL 2.4 (T-C.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan adanya kebijakan negara terkait otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, maka Pemerintah Kota Batam berusaha untuk mencapai kemandirian keuangan daerah.

Bentuk tindak lanjut yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam menyikapi arah kebijakan tersebut adalah dengan upaya-upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah diantaranya:

1. Menyesuaikan besaran dan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
3. Meningkatkan sarana, prasarana, serta memperluas dan mengembangkan Kerjasama dengan mitra dalam rangka penyelenggaraan pembayaran Pajak Daerah agar semakin mudah bagi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Batam Tahun 2025-2029, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, yaitu: ***“Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”***.

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2025-2029 Badan Pendapatan Daerah dirumuskan pada misi ke empat yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*.

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian pesat, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam telah mencanangkan tujuan dan sasaran organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan tujuan dan sasaran tersebut, merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi atau instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan.

A. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yakni meningkatkan kemandirian pembangunan daerah. Tujuan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Walikota Batam Tahun 2025-2029 “Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam

proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi atau pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.

Sasaran yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah. Demi mencapai sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam terus berinovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta terus mengembangkan sistem informasi guna meningkatkan pendapatan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, reviu terhadap RKPD Tahun 2026.

Selain pertimbangan di atas, program dan kegiatan yang tercantum pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 pada dasarnya telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Secara garis besar, Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yang dilaksanakan pada Tahun 2026 yaitu:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif

Adapun jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD tahun anggaran 2026, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada.

3.3.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Hasil Pengerjaan Tabel T-C.33

Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tabel T-C.33 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KOTA BATAM

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Urusan : Penunjang Urusan Pemerintah								
5.02.01	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah; 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat daerah	Kota Batam	73,57 91,50	52.774.099.364	DAU, APBD		74,57 92	52.968.882.913
5.02.01.2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Kota Batam	100%	29.321.800	APBD		100%	32.400.000
5.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	2 Dokumen	18.541.600	APBD		3 Dokumen	20.400.000
5.02.01.2.01.0007	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	3 Laporan	10.782.200	APBD		3 Dokumen	12.000.000
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Kota Batam	100%	46.067.519.040	DAU, APBD		100%	47.238.037.913

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
5.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	210 Orang/Bulan	46.001.119.040	DAU, APBD		210 Orang/Bulan	47.150.389.913
5.02.01.2.02.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	12 Dokumen	66.400.000	APBD		12 Dokumen	87.648.000
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Kota Batam	100%	602.873.800	APBD		100%	449.345.000
5.02.01.2.05.0002	Sub. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	3 Paket	90.997.200	APBD		3 Paket	143.000.000
5.02.01.2.05.0009	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	130 Orang	511.876.600	APBD		60 Orang	306.345.000
5.02.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Kota Batam	100%	2.551.152.525	APBD		100%	2.589.221.000
5.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	40.287.500	APBD		1 Paket	26.231.000
5.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	10 Paket	835.329.125	APBD		9 Paket	918.861.000
5.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kota Batam	4 Paket	546.408.300	APBD		4 Paket	731.625.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Penggandaan	disediakan							
5.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Batam	1 Dokumen	7.881.600	APBD		1 Dokumen	9.504.000
5.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	1.121.246.000	APBD		12 Laporan	903.000.000
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Kota Batam	100%	1.864.447.799	APBD		100%	596.688.000
5.02.01.2.07.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Unit	974.706.000	APBD		NA	NA
5.02.01.2.07.0005	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Batam	34 Unit	241.066.700	APBD		40 Unit	325.389.000
5.02.01.2.07.0006	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	31 Unit	350.608.100	APBD		15 Unit	271.299.000
5.02.01.2.07.0009	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	1 Unit	298.066.999	APBD		NA	NA
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Kota Batam	100%	596.800.000	APBD		100%	656.370.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
5.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Batam	12 Laporan	595.300.000	APBD		12 Laporan	654.390.000
5.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Kota Batam	12 Laporan	1.500.000	APBD		12 Laporan	1.980.000
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Kota Batam	100%	1.061.984.400	APBD		100%	1.406.821.000
5.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kota Batam	1 Unit	40.880.000	APBD		1 Unit	58.924.000
5.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kota Batam	24 Unit	636.280.000	APBD		24 Unit	839.889.000
5.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Batam	275 Unit	384.824.400	APBD		352 Unit	508.008.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
5.02.01	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih;	Kota Batam	10%	8.839.064.400	APBD		10%	13.844.292.000
		2. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target;		98%				98%	
		3. Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah;		4,96%				13,55%	
		4. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment;		6.50%				6.50%	
		5. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment.		6.50%				6.50%	
5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Official Assessment;	Kota Batam	2,76%	8.839.064.400	APBD		2,76%	13.844.292.000
		2. Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah;		100%				100%	
		3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak		2 Dokumen				2 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		Daerah yang Dihasilkan; 4. Persentase Koordinasi dengan PD Penghasil Retribusi; 5. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Self Assessment.		100% 0,90%				100% 1,03%	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	1 Dokumen	131.006.000	APBD		1 Dokumen	321.741.000
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	1 Dokumen	296.300.000	APBD		1 Dokumen	562.918.000
5.02.04.2.01.0003	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	4 Laporan	1.770.461.900	APBD		14 Laporan	2.124.554.000
5.02.04.2.01.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	602 Unit	2.379.000.000	APBD		1.000 Unit	6.000.000.000
5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak	Kota Batam	12 Laporan	589.011.300	APBD		12 Laporan	686.628.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		Daerah							
5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Batam	10 Laporan	1.630.712.000	APBD		10 Laporan	1.712.247.000
5.02.04.2.01.0007	Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kota Batam	10.000 Obyek Pajak	825.912.000	APBD		10.000 Obyek Pajak	908.503.000
5.02.04.2.01.0009	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Batam	9 Layanan	61.920.000	APBD		9 Layanan	113.300.000
5.02.04.2.01.0010	Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kota Batam	17 Dokumen	236.192.600	APBD		17 Dokumen	292.092.000
5.02.04.2.01.0011	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Batam	17 Dokumen	497.950.000	APBD		17 Dokumen	547.744.000
5.02.04.2.01.0012	Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Batam	12 Dokumen	99.991.000	APBD		12 Dokumen	110.000.000
5.02.04.2.01.0013	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Batam	12 Dokumen	152.317.800	APBD		12 Dokumen	264.495.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
5.02.04.2.01.0014	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Batam	4 Laporan	46.882.000	APBD		4 Laporan	51.570.000
5.02.04.2.01.0015	Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Batam	4 Laporan	121.407.800	APBD		4 Laporan	148.500.000
TOTAL ANGGARAN					61.613.163.764				66.813.174.913

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 telah disesuaikan dengan kebutuhan OPD. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada tabel 4.1 tentunya masih berupa rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasinya tergantung pada beberapa faktor misalnya menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya.

Untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan tujuan dan sasaran, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2026 melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dengan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan tabel dibawah ini :

TABEL 4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana		K e t
					APBD	APBN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;	73,57	35.838.060.400	16.936.038.964	
			2. Indeks Pelayanan Kesekretariat an Perangkat daerah	91,50			
I	Kegiatan: Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase dokumen perencanaan, panganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	29.321.800		
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.541.600		
2	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.782.200		
II	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	29.131.480.076	16.936.038.964	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/Bul an	29.065.080.076	16.936.038.964	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	12 Dokumen	66.400.000		

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana		K e t
					APBD	APBN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tugas ASN		Tugas ASN				
III	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	602.873.800		
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	90.997.200		
2	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	511.876.600		
IV	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	2.551.152.525		
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.287.500		
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	835.329.125		
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	546.408.300		
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.881.600		
5	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.121.246.000		
V	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	1.864.447.799		
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	974.706.000		
2	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 Unit	241.066.700		
3	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	31 Unit	350.608.100		

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana		K e t
					APBD	APBN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mesin Lainnya		yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				
4	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	298.066.999		
VI	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	596.800.000		
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	595.300.000		
2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000		
VII	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	1.061.984.400		
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.880.000		
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	636.280.000		
3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	275 Unit	384.824.400		
B	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	1. Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih; 2. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target;	10% 98%	8.839.064.400		

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana		K e t
					APBD	APBN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah; 4. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment; 5. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment.	4,96% 6.50% 6.50%			
I	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Official Assessment; 2. Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah; 3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah yang Dihasilkan; 4. Persentase Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi; 5. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Self Assessment.	2,76% 100% 2 Dokumen 100% 0,90%	8.839.064.400		
1	Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	131.006.000		
2	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	296.300.000		
3	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	1.770.461.900		
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	602 Unit	2.379.000.000		

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana		K e t
					APBD	APBN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Daerah				
5	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	589.011.300		
6	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	10 Laporan	1.630.712.000		
7	Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Batam	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10.000 Obyek Pajak	825.912.000		
8	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	61.920.000		
9	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	17 Dokumen	236.192.600		
10	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	17 Dokumen	497.950.000		
11	Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	99.991.000		
12	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	152.317.800		
13	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	46.882.000		
14	Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	121.407.800		
TOTAL ANGGARAN					44.677.124.800	16.936.038.964	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

5.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan yang membidangi urusan keuangan terkait pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan rumah diantaranya ketaatan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran masih rendah, terdapat beberapa potensi pajak yang belum tergali, rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran usaha secara mandiri.

Langkah-langkah strategis perlu untuk terus ditingkatkan keefektifannya guna mencapai kemandirian perekonomian melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci utama agar dapat melakukan pembangunan dan pengembangan yang berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026, disampaikan bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja ini, maka:

1. Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja OPD yaitu mencapai target realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program dan kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu lalu dievaluasi terkait dengan pelaksanaannya. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Menindaklanjuti beberapa catatan penting dari pelaksanaan tugas yang dijalankan, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam merespon rendahnya tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran adalah dengan menyusun dan atau mengevaluasi regulasi yang sudah ada untuk lebih menekan Wajib Pajak melakukan pembayaran. Regulasi ini bisa dijadikan dasar dalam memberikan pemberitahuan, peringatan, dan proses penindakan yang dilakukan secara tegas dengan bantuan pihak Kejaksaan Negeri Batam.

Belum optimalnya pemetaan potensi pajak daerah turut menyumbang angka penyebab tidak tercapainya target pajak daerah yang telah ditetapkan. Menyikapi hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam akan menggandeng tenaga ahli dan tenaga survey lapangan guna melakukan kajian potensi pajak daerah. Sehingga dari langkah tersebut diharapkan target pajak daerah dapat terealisasi atau bahkan terlampaui.

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran secara mandiri terhadap usaha yang mereka jalankan perlu mendapatkan perhatian besar. Karena hal tersebut dapat menghambat laju realisasi pajak daerah. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kota Batam secara aktif terjun ke lapangan melakukan penagihan serta mencari Wajib Pajak atau Objek Pajak yang belum terdaftar. Jika sampai batas waktu pendaftaran sesuai regulasi Wajib Pajak atau Objek Pajak tidak didaftarkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Batam akan menetapkannya secara jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah lain yang dijalankan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk meningkatkan kesadaran taat pajak adalah dengan memberikan sebuah apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah tertib menjalankan kewajibannya. Menyederhanakan proses pembayaran dengan pemanfaatan teknologi juga bisa mempengaruhi kesadaran taat pajak. Bekerja sama dengan beberapa Bank dan *Marketplace* telah dilakukan, sedangkan metode Qris turut dikembangkan untuk setiap metode pembayaran pajak daerah.

Khusus untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), untuk mencapai target yang sudah ditetapkan terdapat beberapa langkah yang dijalankan, diantaranya melakukan *Roadshow* PBB-P2 ke 12 (dua belas) kecamatan, menggerakkan layanan Sarana Informasi Bus Interaksi Pajak (SIBIJAK) sampai lokasi pemukiman, serta melakukan relaksasi PBB-P2 dengan memberikan penghapusan denda atau bunga terhadap pajak terhutang pada periode tertentu.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun agar menjadi pedoman dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

